

:: INFRASTRUKTUR

Ruas Tol Kebon Jeruk–Ulujami Diharapkan Beroperasi Tahun Ini

JAKARTA – Pemerintah menargetkan ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W2 Tol Kebon Jeruk–Ulujami bisa beroperasi tahun ini. Alasannya, pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 90%, dan ditargetkan bisa rampung dalam waktu dekat.

Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Suhardi mengatakan, pembebasan lahan akan berjalan, seiring dengan konstruksi yang dilakukan PT Jasa Marga.

"Saat ini kita sudah rampungkan pembebasan lahannya untuk ruas Joglo–Ulujami yang sudah mencapai 90%, sementara Kebon Jeruk–Joglo mencapai 86,4%. Bisa saja proses pembebasan lahan bisa selesai dalam waktu dekat," kata dia di Jakarta pekan lalu.

Menurut dia, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama. Pembebasan lahan untuk ruas Kebon Jeruk–Ulujami mencapai Rp818 miliar dengan panjang 7,8 kilometer. "Pembebasan lahan itu unik. Karena bisa saja, selesainya besok namun bisa juga butuh waktu lama," ujarnya.

Kepala Komunikasi Publik

Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengatakan, kendala utama terhambatnya konstruksi jalan tol yang dibangun pemerintah terletak pada pembebasan lahan milik warga. Berlarutnya pembebasan lahan menyebabkan terjadinya *potential loss*. "Yang pasti, kita akui ini menyebabkan biaya bagi investor dari sisi logistiknya," ujarnya.

"Saat ini kita sudah rampungkan pembebasan lahannya untuk ruas Joglo–Ulujami yang sudah mencapai 90%."

SUHARDI

Direktur Bina Teknik
Direktorat Jenderal Bina Marga

Selain ruas tol Kebon Jeruk–Ulujami, sejumlah ruas tol lainnya, terutama untuk trans-Jawa juga menghadapi masalah yang sama. Danis mengata-

kan, pihaknya berharap bisa menggunakan undang-undang pengadaan lahan yang baru.

Menurut dia, dengan undang-undang tersebut, batas waktu pembebasan lahan bisa lebih teratur. "Jadi dengan undang-undang tersebut, nantinya tidak akan ada lagi waktu pembebasan lahan yang mengambang. Dan ini perlu, karena menyangkut kepastian bagi investor," ucapnya.

Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rochman mengatakan, pihaknya berharap pemerintah melalui Jasa Marga bisa menerapkan undang-undang pembebasan lahan yang baru. Menurut dia, selama ini kepastian jalan tol di Indonesia sulit diprediksi penyelesaiannya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji mengatakan, proses pembebasan lahan bisa dilakukan dengan target di bawah 311 hari berdasarkan Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012. Undang-undang tersebut, kata dia, akan mengatur tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

● **ichsanamin**